

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG
BERSTATUS LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

Alvio Senna Fahri
NIM. 2220122012

KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH.
Dr. Hengki Andora, SH., LLM.

Pembimbing I
Pembimbing II

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK
YANG BERSTATUS LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN
BATANG ANAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Alvio Senna Fahri, 2220122012, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2024*

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik tanah yang bersertipikat hak milik di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, pemilik tanah ingin memecah sertipikat tanah dan ingin menjual tanahnya, namun proses pemecahan sertipikat tidak dapat dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman karena termasuk kedalam LSD dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang ingin melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana akibat hukum dari tanah yang termasuk dalam LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? 2) Mengapa tidak dapat dilakukan pemecahan sertipikat hak milik yang tanahnya termasuk dalam LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimana kepastian hukum pemegang sertipikat hak milik yang termasuk LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan penelitian ini yaitu akibat hukum ketika tanah termasuk dalam kawasan LSD ataupun LP2B, tanah tidak dapat dialihfungsikan serta tidak dapat melakukan pemecahan sertipikat. Alasan tidak dapat dilakukannya alih fungsi dan pemecahan sertipikat yaitu karena kantor pertanahan merujuk Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan LP2B. Namun berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di atas tidak sedikitpun menjelaskan bahwa tidak dapat dilakukannya pemecahan sertipikat. Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang termasuk dalam LSD ataupun LP2B yaitu tanah dapat diperalihkan dan pemilik tanah tetap diakui sebagai pemegang hak mutlak namun peralihan hak haruslah sesuai dengan ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960. Tetapi berdasarkan sertipikat pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pemecahan Sertipikat, Lahan Sawah Dilindungi, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

**LEGAL SECURITY AGAINST OWNERSHIP CERTIFICATE HOLDERS WHO
HAVE PROTECTED RICE LAND STATUS IN BATANG ANAI DISTRICT,
PADANG PARIAMAN REGENCY**

*Alvio Senna Fahri, 2220122012, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,
2024*

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRACT

Decree of the Minister of ATR/BPN Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning Determination of Maps of Protected Rice Fields (LSD) in Regencies/Cities in West Sumatra Province and several other provinces creates legal uncertainty for land owners with certificates of ownership in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency, the land owner wants to split the land certificate and wants to sell the land, but the process of splitting the certificate cannot be continued by the Pariaman District Land Office because it is included in the LSD and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). This creates legal uncertainty for land owners who want to take legal action against the land they own. The problem formulation of this research is, 1) What are the legal consequences of land included in the LSD in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency? 2) Why can't the property rights certificate be resolved for the land included in the LSD in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency? 3) What is the legal certainty for holders of property rights certificates including LSD in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency? This research is empirical juridical legal research. The conclusion of this research is that the legal consequences when land is included in the LSD or LP2B area, the land cannot be converted and the certificate cannot be split. The reason why the transfer of functions and splitting of certificates cannot be carried out is because the land office refers to Perpu Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area and Regional Regulation of Padang Pariaman Regency Number 9 of 2021 concerning Protection of Sustainable Agricultural Food Land. However, based on the provisions in the laws and regulations above, it does not explain in the slightest that splitting of the certificate cannot be carried out. Legal certainty for holders of property rights certificates included in LSD or LP2B is that land can be transferred and the land owner is still recognized as the absolute right holder, however the transfer of rights must be in accordance with the provisions of Perpu Number 56 of 1960. However, based on the certificate, the implementation is not in accordance with the provisions of statutory regulations.

Keywords : Certificate Breaking, Protected Rice Land, Sustainable Agricultural Food Plots.

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA